



► EKONOMI MIKRO

Dewan Dukung Pemkot Tata PKL

JOGJA—Upaya Pemkot Jogja dalam menata pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kota Jogja mendapatkan perhatian dari legislator.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, RB Dwi Wahyu mengatakan di satu sisi, dia mendukung kebijakan Pemkot Jogja dalam menata PKL di Kota Jogja yang kian berkembang. Namun, di sisi lain, dia mengingatkan penataan PKL jangan sampai menghilangkan akses ekonomi rakyat kecil.

Sebagai bagian dari usaha kecil menengah (UKM), pedagang kaki lima (PKL) menjadi alternatif untuk menekan angka pengangguran. Namun, di sisi lain, meningkatnya jumlah PKL turut memengaruhi kondisi lingkungan dan akses bagi pejalan kaki.

“Sehingga, dalam penataan PKL juga harus diikuti dengan penyiapan infrastruktur pendukung, pendampingan usaha, dan akses permodalan,” kata dia melalui rilis yang diterima *Harian Jogja*, Kamis (30/1).

Politikus PDI Perjuangan ini memang sejak awal menaruh perhatian besar terhadap perkembangan UKM. Menurutnya, UKM merupakan

Dukungan permodalan bagi UKM dan ekonomi kreatif di Jogja melalui skema bunga rendah dan tanpa agunan jelas sangat diperlukan.

RB Dwi Wahyu
Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY

motor penggerak penting perekonomian masyarakat. Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, UKM juga tahap terhadap kondisi krisis sehingga UKM harus mendapat dukungan pemerintah.

Itulah sebabnya, program-program pemerintah wajib memperhatikan skala usaha masing-masing UKM. Kategori UKM bisa dilihat dari skala usaha seperti dasar, lanjutan, dan mandiri.

Di level dasar, pemerintah perlu berupaya mendorong tumbuhnya UKM dan kewirausahaan baru

sehingga muncul para kelompok usaha atau wirausahawan baru yang punya proyeksi ekonomi kreatif dan menyerap tenaga kerja.

“Jogja memiliki kelebihan dari aspek sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif,” ucap dia.

Di level lanjutan, UKM-UKM yang berbasis kelompok usaha ini perlu terus mendapatkan dukungan berupa pendampingan usaha, seperti manajemen usaha, pengelolaan keuangan, dan inovasi usaha untuk terus tumbuh dan berkembang.

Selama berinteraksi dengan para kelompok UKM dan penggerak ekonomi kreatif di Yogyakarta, Dwi menangkap kebutuhan dukungan permodalan dari lembaga-lembaga keuangan melalui skema bunga rendah dan tanpa agunan.

Untuk itu, Dwi Wahyu berharap Pemkot Jogja turut mendorong adanya badan usaha milik daerah (BUMD) guna mendukung akses permodalan bagi UKM.

“Dukungan permodalan bagi UKM dan ekonomi kreatif di Jogja melalui skema bunga rendah dan tanpa agunan jelas sangat diperlukan,” kata Dwi.

(Arief Junianto/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005